

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan gencarnya tuntutan pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan nasional maupun daerah, maka pengukuran kinerja juga sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Salah satu organisasi sektor publik terbesar, pemerintah sudah semestinya menerapkan pengukuran kinerja secara berkelanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban (Mardiasmo 2016). Perkembangan sektor publik menunjukkan peningkatan tuntutan untuk organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menerapkan akuntabilitas publik. Dalam akuntabilitas sektor publik, pihak pemegang amanah bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewewengan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Proses pelaporan keuangan sektor publik, terutama organisasi pemerintah daerah, terdiri dari kepala bagian keuangan dan staf keuangan. Mereka berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode tertentu. Untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, serta pengalaman dan pelatihan di bidang akuntansi.

Informasi yang bermanfaat bagi pengguna adalah informasi yang bermanfaat karena dapat membantu mereka membuat keputusan dan dapat dipahami. Oleh karena itu, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, pemerintah daerah harus memperhatikan informasi dalam laporan keuangan. Untuk memenuhi tujuannya, informasi akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar kualitatif. Nilai informasi laporan keuangan dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Yusuf 2015).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangannya. Laporan keuangan pemerintah harus tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik No. 24 Tahun 2005. Setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum.

Dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting*, *Governmental Accounting Standard Board* (GASB), (1999) menyatakan bahwa pentingnya informasi laporan keuangan merupakan dasar pelaporan keuangan pemerintahan. Hak masyarakat untuk mengetahui dan

menerima penjelasan tentang bagaimana sumber daya dikumpulkan dan digunakan. Laporan keuangan adalah posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Ini adalah alat entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik dan berfungsi sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, informasi keuangan harus memiliki nilai agar dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria berikut: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa pihak yang berkepentingan akan menggunakan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai karena LKPD memiliki peran yang sangat penting bagi pengguna LKPD. Menurut Sumaryati et al., (2020) untuk mencapai hal tersebut, suatu instansi harus memiliki kualitas sistem informasi, khususnya sistem informasi manajemen daerah. Menurut Lutfiati et al., (2021) laporan keuangan juga merupakan media

yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dalam sektor privat maupun sektor publik tentang bagaimana suatu organisasi akan berjalan kedepannya. Dalam sektor publik yang menjadi fokus adalah instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan laporan keuangan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Untuk itu, penting bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas laporan keuangan agar dapat mudah dipahami penggunaannya, mempunyai pengungkapan yang cukup, disajikan secara wajar, jujur apa adanya serta memenuhi karakteristiknya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Yusrianti et al. 2021).

Selain itu, laporan keuangan pemerintah membantu pengguna menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pihak-pihak yang memberikan atau terlibat dalam proses donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah. Namun, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan pemerintah. Misalnya, masyarakat membutuhkan laporan keuangan untuk menilai

akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan uang negara atau daerah, wakil rakyat membutuhkan laporan keuangan untuk menilai pelaksanaan anggaran oleh eksekutif, dan lembaga pemeriksa membutuhkan laporan keuangan untuk menjalankan tu. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan informasi semua orang yang membutuhkan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 revisi 2009).

Setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai oleh BPK dan diberikan opini. Jika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini menandakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah tersebut telah disajikan dengan cara yang wajar dan berkualitas (Tawaqal and Suparno 2017).

Adapun fenomena yang terjadi berdasarkan surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan provinsi Aceh, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian *intern* maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota lhokseumawe

tahun anggaran 2022 yaitu, Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 tidak realistis mengakibatkan timbulnya utang belanja sebesar Rp39.806.720.922,76 dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp37.567.275.063,95 yang akan membebani anggaran tahun berikutnya; Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp236.396.150,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp19.800.000,00; dan Kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan Belanja Modal pada lima SKPK mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.052.693.232,20 (LKJiP BPKD 2023).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari pemanfaatan teknologi, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia.

Faktor yang pertama itu adalah pemanfaatan teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Menurut Komarasari (2016) kapasitas yang belum memadai belum tentu menghasilkan laporan keuangan yang andal jika masih belum didukung dengan teknologi informasi. Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Dalam pemerintahan khususnya Kota Lhokseumawe, teknologi informasi dan komunikasi sendiri telah ada dengan berbagai macam program seperti e-

government dan *e-learning*. Walaupun kontennya sendiri sangat bergantung pada penetrasi akses ke internet dan inovasi-inovasi baru *software*. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memainkan peranan yang besar di dalam mendukung *good governance* melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberi ketegasan dalam hal ini. Dan ini sangat tergantung kepada pengelola pemerintahan dan peran aktif masyarakatnya sehingga *good governance* ini bisa direalisasikan dan bukan hanya sekedar mitos belaka.

Dalam penyampaian informasi pada warga masyarakat dengan berbagai latar belakang dan karakteristik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu cara dalam meningkatkan dialog antar pemerintah dengan masyarakat. Baik itu dalam proses pelayanan administrasi maupun pelayanan publik guna membentuk pemerintahan yang lebih transparan. Hal ini juga bisa menawarkan potensi partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah. Walaupun kemudian hadir kesenjangan teknologi dan digital antar wilayah dalam sesebuah daerah seperti belum meratanya infrastruktur, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia dalam penerapan teknologi, selanjutnya berpotensi tidak menjadi prioritas utama oleh beberapa pemerintahan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menjajaki era baru pemerintahan digital melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Terintegrasi (SIPINTER), sebagai langkah awal menuju pemerintahan digital (*digital government*). Dengan SIPINTER, data antar OPD akan menjadi lebih terintegrasi,

dan data yang dipublikasikan akan bersifat seragam dan konsisten SIPINTER adalah aset milik Pemerintah Kota Lhokseumawe dan perlu dijaga bersama dengan baik. Diharapkan SIPINTER akan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dan seluruh ASN, sambil mendoakan kesuksesan dalam pelaksanaannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu pengikat, yang memberi pengaruh pada tujuan dan nilai, serta kepentingan pada organisasi, terlepas dari instrumental yang semata-mata cukup, ditinjau dari konsep menurut tiga dimensi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan. Siregar (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi, karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika anggota organisasi terikat dengan nilai-nilai organisasi maka mereka akan senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan yang berkualitas.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi, menjaga kelestarian

lingkungan hidup, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan komitmen tersebut seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya anggaran, dan budaya kerja yang belum optimal. Diperlukan upaya yang keras dan berkelanjutan dari semua pihak untuk mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya sistem pengendalian *intern*. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bergantung pada seberapa baik pengendalian internalnya. Jika tidak baik, akan sulit untuk menemukan kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi dan data akuntansi tidak dapat diandalkan. Sebuah sistem pengendalian *intern* tidak bertujuan untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau kecurangan; namun, sistem yang berfungsi dengan baik dapat menekan kesalahan dan kecurangan pada tingkat yang dapat dianggap wajar dan memungkinkan identifikasi dan penanganan segera setelah terjadi.

Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) di SKPK Lhokseumawe merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sistem Pengendalian *Intern* di SKPK Lhokseumawe memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun masih terdapat beberapa

tantangan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas SPI di SKPK Lhokseumawe.

Penerapan SPI di SKPK Lhokseumawe sudah didukung dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Lhokseumawe, pedoman Umum Penerapan SPI di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, pembentukan Unit Pengendalian Intern (UPIP) di setiap SKPK, pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai SKPK, dan melakukan audit *internal* secara berkala untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian *Intern*.

Faktor keempat yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kualitas sumber daya manusia. Menurut Roviyanitie (2011) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat penting; hasil laporan keuangan yang baik sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja yang kompeten. Ini juga berlaku untuk entitas pemerintah daerah; tenaga kerja yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan daerah, bahkan di tingkat organisasi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Kota Lhokseumawe masih menjadi tantangan. Seperti kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu, seperti IT dan perencanaan pembangunan, Keterampilan dan pengetahuan aparatur belum mengikuti perkembangan teknologi, dan masih banyak aparatur yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

Alasan memilih keempat variabel tersebut karena keempat faktor di atas saling terkait dan saling mendukung. Pemanfaatan teknologi informasi akan lebih efektif jika didukung oleh komitmen organisasi yang kuat, sistem pengendalian internal yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih produktif jika didukung oleh teknologi yang memadai dan sistem kerja yang efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih bernilai bagi pengguna.

Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe selama 6 tahun terakhir ini tidak pernah melakukan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pelatihan. Yakni sejak tahun 2016 hingga 2022 lalu, dengan berbagai alasan kebijakan pemerintah setempat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lhokseumawe, Dr. Muhammad Irsyadi, dikonfirmasi Rakyat Aceh, di sela-sela sosialisasi pedoman pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Lhokseumawe yang diberlangsung di oprom Kantor Wali Kota (infopublik.id).

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan kualitas SDM di Pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat terus meningkat. Hal ini akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti mengidentifikasi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi terhadap nilai informasi laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian *intern* terhadap nilai informasi laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPK Kota Lhokseumawe.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya aktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi masukan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada SKPK Kota Lhokseumawe.

3. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kedepannya untuk kegiatan penelitian yang sejenis yaitu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPK Kota Lhokseumawe.